

PEMBERDAYAAN KAUM IBU SEBAGAI UPAYA MEMUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN

Ihsana Sabriani Boruologo *

Abstrak

Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin di Indonesia. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengentaskan kemiskinan ini melalui pemberian dana bantuan yang bersifat insidental. Bantuan ini tidak memberikan manfaat banyak bagi pengentasan kemiskinan justru menciptakan mental pengemis. Seharusnya, bantuan dana diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan gratis dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Tingginya angka kemiskinan terjadi karena rendahnya kualitas SDM. Anak-anak tidak bersekolah karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan mereka. Hal ini semakin memperpanjang rantai kemiskinan, karena kelak anak-anak ini juga akan sulit mendapatkan pekerjaan yang memadai karena tidak memiliki pendidikan yang layak.

Pengentasan kemiskinan tidak semata-mata dilihat dari faktor ekonomi saja, namun juga dari faktor sosio kultural. Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat. Melalui keluarga, pemerintah dan swasta dapat membantu mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM.

Kaum ibu dapat diberdayakan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan. Ibu dapat membantu suami menjadi pencari nafkah, sehingga pendapatan keluarga menjadi lebih tinggi. Namun, ibu harus disiapkan melalui pelatihan agar memiliki keterampilan kerja yang baik sehingga dapat berwirausaha ataupun bekerja dengan kualitas kerja yang baik. Dana insidental yang biasanya diberikan pemerintah untuk membantu rakyat miskin, dapat diarahkan untuk pengadaan pelatihan keterampilan bagi kaum ibu.

* **Ihsana Sabriani Boruologo, Dra. M.Si.**, adalah dosen Tetap Fakultas Psikologi Unisba

Ibu bekerja berarti menjalankan peran ganda yang tentunya tidaklah mudah. Karena itu, ibu membutuhkan mitra dalam berbagi pelaksanaan pengasuhan anak. Ketersediaan childcare dan parenting club akan sangat membantu ibu untuk dapat menjalankan peran gandanya dengan lebih baik. Pemerintah dapat bekerjasama dengan swasta dan perguruan tinggi dalam pengelolaan childcare dan parenting club ini.

Kata kunci : Pemberdayaan kaum ibu, childcare, parenting club.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang terus berlanjut di Indonesia. Sejak terjadi krisis ekonomi, Indonesia belum benar-benar pulih dari keterpurukan sehingga jumlah penduduk miskin semakin bertambah dari tahun ke tahun. Biro Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta jiwa (17,75%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta jiwa (15,97%), berarti tingkat kemiskinan meningkat 1,78%, atau bertambah sebanyak 3,95 juta jiwa. Di Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 14,85 juta jiwa, di mana sebanyak 1,19 juta jiwa tinggal di Kabupaten Bandung dan 284.000 jiwa tinggal di Kotamadya Bandung.

Sesungguhnya pemerintah maupun swasta, telah melakukan berbagai hal untuk dapat menekan angka kemiskinan ini. Berbagai program seperti Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil Menengah, Jaring Pengaman Sosial dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) telah dilaksanakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun, ternyata program-program tersebut tidak cukup efektif untuk membantu para keluarga miskin. Sebagian dari kegiatan tersebut hanya bersifat situasional dan oleh sebagian ahli ekonomi dinyatakan bahwa program-program tersebut lebih bersifat politis daripada menyelesaikan akar masalah kemiskinan.

Tingginya angka kemiskinan tidak jarang membuat keluarga terpaksa melibatkan hampir seluruh anggota keluarganya untuk mencari nafkah, termasuk kaum ibu dan anak-anak. Di satu sisi, kondisi ini memberikan sedikit keuntungan karena sumber pendapatan lebih dari satu. Namun di sisi lain, timbul masalah baru berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan

pendidikan serta masalah pengasuhan dan pengawasan oleh orang tua terhadap anak yang menjadi lebih permisif. Anak-anak yang bekerja memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk dapat melanjutkan pendidikan yang menjadi haknya. Orang tua yang bekerja, pada umumnya terpaksa harus meninggalkan anak sejak pagi hingga sore hari. Untuk pengasuhan dan pengawasan anak, biasanya orang tua meminta bantuan kepada anggota keluarga lainnya. Namun, tidak selalu ada anggota keluarga yang benar-benar dapat diandalkan oleh orang tua, sehingga keikutsertaan ibu bekerja mencari nafkah dapat menimbulkan masalah baru dalam pengasuhan dan pengawasan anak.

Sebagai institusi sosial terkecil, sejatinya keluarga merupakan sentra kehidupan utama, sehingga dapat menjadi penentu keberhasilan hidup para anggota keluarganya. Namun, jerat kemiskinan mempersulit orang tua untuk dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai orang tua karena lebih difokuskan pada upaya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Mengacu kepada uraian di atas, di mana di satu sisi terdapat keluhan dan masalah berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan sehingga keluarga melibatkan seluruh anggota keluarganya untuk mencari nafkah, sementara di sisi lain pendidikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua dan menjadi hak anak agar kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan, maka karya tulis ini akan mencoba memberikan uraian mengenai pemberdayaan kaum ibu sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan.

1.2 Perumusan Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena sosial, sehingga upaya penanggulangannya haruslah dilakukan secara komprehensif dan multidisipliner. Tulisan ini mencoba membahas upaya pengentasan kemiskinan dari sudut pandang sosio kultural melalui pemberdayaan kaum ibu sebagai pemutus mata rantai kemiskinan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau yang tidak berdaya agar mampu mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

- 1) Masalah apa sajakah yang menyebabkan kegagalan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan?
- 2) Masalah apa sajakah yang timbul di dalam keluarga akibat kemiskinan?

- 3) Bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks keluarga?
- 4) Bagaimana upaya pemberdayaan kaum ibu?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah membahas upaya pemberdayaan kaum ibu untuk memutus mata rantai kemiskinan.

1.4 Manfaat Penulisan

Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam melakukan langkah nyata mengatasi masalah kemiskinan dalam konteks keluarga.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Pengertian Keluarga

Keluarga (*family*) berasal dari kata Latin *familia* yang memiliki empat konsep penting. Pertama, *kin*, yaitu individu yang memiliki ikatan darah atau karena terikat secara hukum; kedua, *non-kin*, yaitu individu yang tidak memiliki ikatan darah atau terikat secara hukum, tapi memiliki hubungan saling ketergantungan, saling mengasihi ataupun hubungan kerjasama; ketiga, *household*, yaitu orang-orang yang tinggal bersama dalam suatu rumah tangga baik kin maupun non-kin; keempat *head of household*, yaitu orang yang menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga (Bardoel, 2007 : 1)

Secara umum, keluarga merupakan agen sosial utama dan menjadi kelompok sosial pertama yang dimiliki individu di sepanjang rentang kehidupannya. Di dalam keluarga terdapat sejumlah peran yang harus dilakukan oleh individu serta upaya-upaya keberhasilan pelaksanaan peran sosial di dalam keluarga. Harapan mengenai keberhasilan pelaksanaan peran sosial di dalam keluarga, dapat berubah terkait faktor usia, sehingga sangat memungkinkan individu menjalankan beberapa peran sosial di dalam keluarga secara bersamaan, misalkan sebagai ibu dan jua istri. (Hayslip, 1989 : 315).

1.5.2 Tipe Keluarga

Menurut Hayslip (1989 : 316) terdapat beberapa tipe keluarga, yaitu :

1. *Traditional Nuclear Family*
Yaitu keluarga inti yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak.
2. *Dyadic Nuclear Family*
Yaitu keluarga yang terdiri dari suami dan istri tapi tidak memiliki anak.
3. *Single-parent Family*
Yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal (karena pasangan meninggal dunia ataupun karena perceraian) dengan anak-anak.
4. *Three-generation Family*
Yaitu keluarga yang terdiri dari tiga generasi, kakek-nenek, orang tua dan anak-anak. Sering disebut sebagai *extended family*.
5. *Middle-aged/old-age couple*
Yaitu keluarga yang terdiri dari suami dan istri, tetapi anak-anak sudah dewasa sehingga tidak ada yang tinggal bersama orang tua lagi.
6. *Communal Family*
Yaitu keluarga yang terdiri dari dua atau lebih nuclear family dan tinggal bersama dalam satu lingkungan serta berbagi tugas dan tanggung jawab pengasuhan anak.
7. *Sibling Family*
Yaitu keluarga yang terdiri dari kakak beradik yang tidak/belum menikah dan tinggal bersama.

1.5.3 Masalah Pada Keluarga Yang Bekerja

Beban hidup yang tinggi membuat pasangan suami istri harus bekerja. Menurut Hayslip (1989 : 318) terdapat sejumlah keuntungan jika pasangan suami istri bekerja, yaitu sumber pendapatan ada dua sehingga relatif lebih stabil; adanya kesempatan bagi pasangan suami istri untuk mengekspresikan diri, mengembangkan kreativitas dan prestasi; lebih mandiri dalam menjalankan peran.

Namun, jika seorang istri bekerja, terdapat sejumlah masalah yang mungkin timbul, seperti adanya diskriminasi gender dalam dunia kerja,

kelelahan yang teramat sangat sehingga menyulitkan menjalankan peran sebagai ibu, masalah yang terkait menjaga kesehatan kehamilan, anak-anak kurang mendapatkan pengawasan yang memadai, kurangnya waktu untuk berinteraksi dengan anggota keluarga lain serta masalah kompetitif dengan suami (Hayslip, 1989 : 318).

Kesulitan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, merupakan masalah global yang dihadapi oleh pasangan suami-istri yang bekerja. Menurut Saphiro dan Noble (2001), terdapat tiga hal yang dihayati para pekerja sebagai kendala menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan keluarga. Pertama, tidak adanya kebijakan yang bersifat fleksibel di dunia kerja; kedua, keterkaitan dan ketergantungan hubungan kerja; ketiga, efek negatif dari beban kerja yang tinggi ataupun jam kerja yang panjang.

1.5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Keluarga Bekerja

Menurut Spink (2003), terdapat sejumlah faktor yang dapat mendukung para pekerja menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kehidupan keluarganya. Berikut ini akan dijelaskan satu per satu.

1. Budaya dan Tradisi

Faktor budaya dan tradisi mempengaruhi bagaimana suatu keluarga dapat menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kehidupan keluarga. Dalam hal ini termasuk keyakinan beragama, pandangan mengenai struktur keluarga tradisional (ayah yang bekerja, sementara ibu mengasuh anak) dan peran gender. Di sejumlah negara Asia, perempuan yang bekerja dituntut menjalankan peran ganda namun mendapatkan dukungan dari keluarga terdekat untuk melakukan pengasuhan anak.

2. Kebijakan Publik

Yang termasuk dalam kebijakan publik adalah peraturan ketenagakerjaan meliputi jam kerja, liburan, lembur, cuti melahirkan, dan lain-lain sehingga para pekerja dapat memanfaatkannya secara efektif.

3. Infrastruktur Komunitas

Selayaknya terdapat infrastruktur komunitas untuk mendukung para pekerja sehingga mereka dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan keluarga. Yang termasuk dalam infrastruktur ini, misalnya adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pengasuhan anak selama orang tua bekerja (*childcare*) dan *parenting support*, maupun

dukungan dan fasilitas umum yang memadai di dunia kerja untuk orang-orang berkebutuhan khusus.

2 Pembahasan

Pengentasan kemiskinan haruslah dimulai dari keluarga, dengan meningkatkan kualitas masing-masing anggota keluarganya. Peran ibu sangatlah besar, karena selain berperan sebagai pengasuh juga menjalankan peran membantu mencari nafkah. Melalui ibu, anak-anak akan belajar meningkatkan kualitas dirinya, mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak sehingga kelak dapat bekerja dengan lebih layak. Dengan demikian, ibu dapat menjadi agen pemutus mata rantai kemiskinan. Sistematis pembahasan mengacu pada perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, akan dibahas mengenai penyebab kegagalan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, masalah di dalam keluarga miskin, upaya penanggulangan kemiskinan dalam konteks keluarga, serta upaya yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan kaum ibu.

2.1 Penyebab Kegagalan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan

Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah tidak cukup berhasil mengatasi masalah. Hal ini terjadi karena cenderung hanya berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin, baik berupa JPS (Jaring Pengaman Sosial) maupun BLT (Bantuan Langsung Tunai). Hal ini justru menimbulkan masalah baru, di mana masyarakat menjadi tergantung dan mengajarkan masyarakat menjadi malas berusaha karena hanya menanti bantuan. Seharusnya, program bantuan lebih diarahkan pada budaya ekonomi produktif sehingga masyarakat dapat mandiri. Selain itu, akan lebih bermanfaat jika dana yang ada digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti pembebasan biaya sekolah untuk program wajib belajar 9 tahun sejak SD sampai SMP maupun peningkatan kualitas pelayanan dan pengobatan di Puskesmas secara gratis. Karena sumber daya manusia berkualitas merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh masyarakat, maka seharusnya dana dari pemerintah lebih baik diarahkan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tentunya lebih mendidik dan memberikan keberhasilan yang bersifat jangka panjang.

2.2 Masalah Di Dalam Keluarga Miskin

Anak-anak yang datang dari keluarga miskin, pada umumnya kurang mendapatkan pendidikan yang layak karena orang tua tidak mampu membayar biaya pendidikan anak. Banyak kasus anak yang putus sekolah atau terpaksa harus membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah. Kondisi ini tentunya tidak memutus mata rantai kemiskinan. Karena kelak anak-anak ini dewasa, mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak akibat rendahnya pendidikan mereka.

Selain anak-anak, tuntutan hidup yang tinggi juga kerap melibatkan kaum ibu dalam kegiatan mencari nafkah untuk keluarga. Di Indonesia, 43,5% perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja. Ini berarti, terjadi perubahan fundamental dalam struktur keluarga, di mana kedua orang tua bekerja. Di satu sisi, hal ini memberikan keuntungan bagi pendapatan keluarga, namun di sisi lain, pengasuhan dan pengawasan anak menjadi masalah baru yang muncul akibat kedua orang tua bekerja. Jika dulu orang tua dapat melibatkan anggota keluarga lain (*extended family*) untuk dimintai bantuan dalam pengasuhan dan pengawasan anak, kondisi ini agak sulit dilakukan pada masa ini. Menurut E.A. Bardoel (2007 : 2), hal ini terjadi karena *extended family* juga harus bekerja atau *extended family* tinggal di tempat yang jauh.

Sebagai institusi sosial terkecil, sejatinya keluarga merupakan sentra kehidupan utama, sehingga dapat menjadi penentu keberhasilan hidup para anggota keluarganya. Namun, jerat kemiskinan mempersulit orang tua untuk dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai orang tua karena lebih difokuskan pada upaya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Ketiadaan pengasuhan yang memadai, menyebabkan anak-anak menjadi terlantar dan kurang mendapatkan perhatian dan pendidikan yang memadai. Akibatnya, keikutsertaan ibu dalam dunia kerja dapat menimbulkan masalah baru yang diprediksi berpotensi memperpanjang jerat kemiskinan.

2.3 Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dalam Konteks Keluarga

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang tidak hanya semata-mata terkait faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosio kultural. Upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan pemerintah, justru lebih banyak menciptakan mental pengemis daripada

mengembangkan mental berusaha. Solusi bantuan keuangan yang bersifat insidental hanya mengatasi masalah sesaat.

Tingginya jumlah keluarga miskin di Indonesia harus diwaspadai sebagai suatu peringatan agar tidak lahir keluarga-keluarga miskin baru. Berdasarkan pengamatan penulis, salah satu sumber penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia adalah karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat berpendidikan rendah, tentunya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga pendapatannya menjadi rendah. Rendahnya pendapatan orang tua, menyebabkan orang tua tidak dapat membiayai pendidikan anak, sehingga pendidikan anak juga menjadi rendah. Pendidikan anak yang rendah mengakibatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi rendah, sehingga di kemudian hari anak pun akan mengalami kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak yang berakibat pendapatannya juga rendah. Selain itu, untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tidak jarang orang tua melibatkan anak-anaknya yang masih berusia sekolah untuk mencari nafkah. Di satu sisi, hal ini membawa sedikit keuntungan bagi orang tua karena terjadi peningkatan pendapatan. Namun di sisi lain, strategi yang dilakukan oleh orang tua ini akan berdampak pada rendahnya kualitas SDM karena anak tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Akibatnya, kualitas pendidikan anak-anak mereka relatif rendah, sehingga strategi ini justru memperpanjang rantai kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memutus rantai kemiskinan dimulai dari keluarga. Bantuan yang diberikan pemerintah, diarahkan pada usaha untuk membantu keluarga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang layak bagi anak-anak adalah salah satu alternatif meningkatkan sumber daya manusia untuk memutus mata rantai kemiskinan ini. Karena itu, dana bantuan yang bersifat insidental akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk memberikan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa.

2.4 Pemberdayaan Kaum Ibu

Sebagai institusi sosial terkecil, keluarga hendaknya dapat dijadikan model bagi anak untuk belajar bertingkah laku, mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang serta belajar nilai-nilai yang dipandang penting bagi kehidupannya di masa depan. Oleh karena itu, sangatlah tidak layak jika anak dilibatkan dalam kegiatan mencari nafkah. Sebagai salah satu solusi, ibu dapat diikutsertakan dalam kegiatan mencari nafkah. Secara kultural, hal

ini dapat dilakukan karena perempuan dianggap mampu menjalankan peran ganda walaupun disadari terdapat banyak tantangan dan kesulitan. Untuk tujuan ini, tentunya seorang ibu harus memiliki bekal keterampilan dan kemampuan tertentu. Potensi yang dimiliki oleh para ibu dapat digali melalui pelatihan keterampilan, baik untuk mengajarkan kemampuan berwirausaha maupun keterampilan menjalankan tugas di dunia kerja. Untuk itu, dana pemerintah yang selama ini hanya diarahkan untuk bantuan insidental dapat diubah arahnya untuk pemberdayaan kaum ibu melalui pelatihan-pelatihan keterampilan kerja dan berwirausaha. Pemerintah dapat mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan untuk para ibu yang datang dari keluarga miskin. Pengelolaan pelatihan keterampilan ini dapat melibatkan pihak swasta maupun perguruan tinggi agar program pelatihan yang diberikan dapat terstruktur dan berhasil guna, Pelatihan keterampilan dapat disesuaikan dengan arah minat dan potensi masing-masing ibu. Melalui kegiatan ini, diharapkan para ibu akan mengalami peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat membantu keluarga dalam mencari nafkah.

Peran ganda perempuan merupakan suatu masalah kompleks yang kerap menjadi diskusi panjang. Namun, tuntutan hidup yang tinggi, tidak jarang memaksa kaum perempuan untuk menjalankan peran ganda sebagai ibu dan juga sebagai pencari nafkah membantu suami. Beban yang dirasakan para ibu yang menjalankan peran ganda tentulah lebih sulit dan berat. Mereka harus berkonsentrasi di pekerjaannya dan juga berkonsentrasi dalam pengasuhan anak. Menurut E.A. Bardoel (2007 : 1), saat ini kaum ibu sulit untuk meminta bantuan dari *extended family* untuk membantu pengasuhan anak-anaknya karena pada umumnya *extended family* juga bekerja. Karena itu, sangatlah penting bahwa pemerintah menyediakan infrastruktur yang dapat membantu kaum ibu menyeimbangkan tugasnya menjalankan peran sebagai ibu dan sebagai pekerja. Infrastruktur yang dimaksud adalah *childcare* dan *parenting club* yang akan membantu ibu untuk berbagi tugas pengasuhan anak. Peran pemerintah sangatlah penting dalam penyediaan sarana dan prasarana *childcare* dan *parenting club* ini. Dana bantuan pemerintah dapat diarahkan untuk kegiatan ini dengan bantuan pengelolaan dari perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau jurusan yang terkait dengan tumbuh kembang anak. Melalui *childcare*, ibu dapat menitipkan anak-anaknya selama ia bekerja. Di *childcare*, anak-anak ini akan mendapatkan stimulasi tumbuh kembang yang memadai serta pemantauan kesehatan. Bagi ibu, *childcare* akan sangat membantu dalam berbagi tugas pengasuhan anak. Bagi anak, *childcare* akan memberikan banyak stimulasi

untuk membantu tumbuh kembangnya sehingga menjadi individu berkualitas. Sedangkan bagi pengelola perguruan tinggi, dapat menjadi media praktik bagi para mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang mereka miliki.

Selain *childcare*, *parenting club* juga akan sangat membantu ibu bekerja untuk berbagi pengetahuan pengasuhan anak. Melalui *parenting club*, ibu dapat berdiskusi mengenai masalah-masalah seputar tumbuh kembang anak dan mencari solusi terbaik bagi masalah tersebut. Melalui *parenting club*, ibu akan memiliki mitra dalam pengasuhan anak, sehingga dapat memberikan kualitas pengasuhan terbaik.

Jika ibu bekerja dengan memiliki dasar keterampilan yang baik yang diperoleh melalui pelatihan, diharapkan ibu akan memiliki pendapatan yang lebih baik. Selain itu, ibu dapat bekerja dengan tenang karena memiliki mitra dalam berbagi tugas melaksanakan pengasuhan anak. Dengan demikian, diharapkan anak-anak pun akan mengalami tumbuh kembang yang jauh lebih baik.

3 Penutup

3.1 Kesimpulan

- 1) Perlu pembahasan yang bersifat komprehensif dan multidisipliner untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan.
- 2) Bantuan dana insidental yang diberikan pemerintah tidak menjadi solusi terbaik dalam pengentasan kemiskinan.
- 3) Masalah kemiskinan dimulai dari rendahnya kualitas sumber daya manusia di dalam keluarga.
- 4) Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan mulai dari akar masalah melalui cara menciptakan keluarga yang berorientasi pada ekonomi produktif dan sumber daya manusia berkualitas.
- 5) Anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam usaha mencari nafkah untuk keluarga. Jika dirasakan perlu, kaum ibu dapat diberdayakan untuk membantu mencari nafkah.

3.2 Saran

- 1) Bantuan dana dari pemerintah lebih baik diarahkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan gratis bagi rakyat miskin dan pelayanan kesehatan.
 - 2) Pemberdayaan kaum ibu untuk memutus mata rantai kemiskinan perlu dilakukan dengan membekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun wirausaha.
 - 3) Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu diselenggarakan infrastruktur yang menjadi mitra ibu bekerja dalam pengasuhan dan pendidikan anak, baik *childcare* maupun *parenting club*.
-

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Bardoel, E.A. 2007. *Reconciling Work and Family Responsibility : A Global Perspective – Improving The Quality of Human Life : Multidisciplinary Approach on Strategic Relevance for Urban Issues*, Internatinal Conference.
- Gage, N.L. and Berliner, David C. 1979. *Educational Psychology Second Edition*. Chicago : Rand Mc Nally College Publishing Company.
- Hayslip, Bert. 1989. *Adult Development and Aging*, USA : Harper and Row.
- Papalia, Diane. 1998. *Human Development- Seventh Edition*. USA : Mc. Graw Hill.

B. Sumber Lain:

- Pikiran Rakyat, 17 Oktober 2005.
- Kompas, 2 September 2006.